



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari
Telepon (0986) 2217088, Faksimile (0986) 2217087
Web: <http://bpkp.go.id>, email: papua.barat@bpkp.go.id

**NOTA DINAS
Nomor: OT.04/ND-05/PW27.3/2023**

Dari : Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Kepada Yth. : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/ 01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Tahun 2022 Nomor OT.04/LPP-01/PW27.3/2022 tanggal 27 Januari 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

27 Januari 2023
Korwas Bidang APD

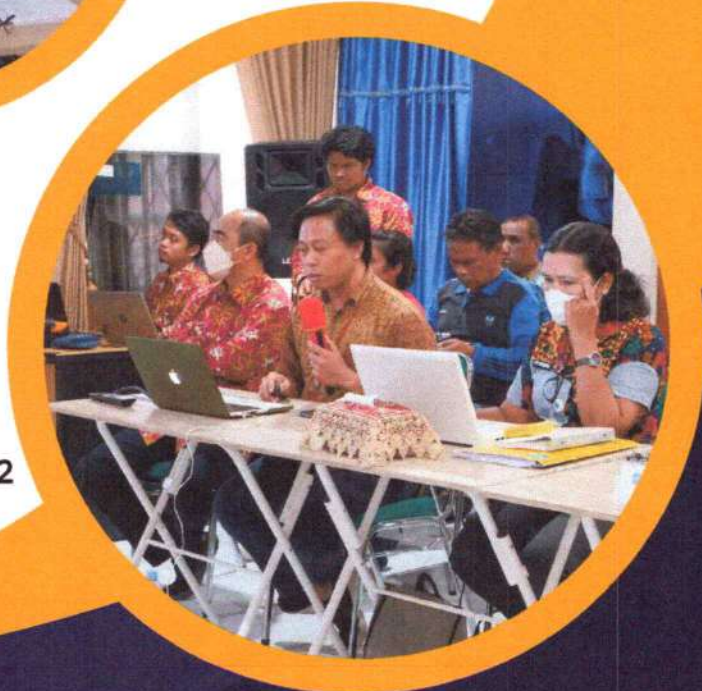


Martinus Tonapa
NIP 19650515 199103 1 001



LAPORAN KINERJA 2022

**BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (APD)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT**



Nomor : OT.04/LPP-01/PW27.3/2022
Tanggal : 27 Januari 2023



*"Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit.
Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip"*

Jusuf Kalla

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Kata Pengantar.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	6
B. Struktur Organisasi	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	9
A. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	13
B. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022.....	21
C. Capaian Kinerja Lainnya	21
BAB 4 PENUTUP	24
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022	24
B. Rencana Tindak Tahun 2023	24
Kilas Peristiwa Bidang APD Tahun 2022.....	26

KATA PENGANTAR



Sejak tahun 2003 dan dengan dikeluarkannya tiga Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara, akuntabilitas pemerintah Indonesia telah bergeser kepada dua bagian, yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas kinerja adalah instrumen pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi atas kinerja yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan.

Sedangkan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan telah dijadikan acuan untuk pengukuran kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022, telah disusun Laporan Kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Tahun 2022 yang disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Laporan kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Tahun 2022 ini kami harapkan bisa menyajikan informasi dan memberikan manfaat kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk melakukan evaluasi kinerja dan menetapkan langkah strategis untuk peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun mendatang.

Korwas Bidang APD

Martinus Tonapa

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang APD dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BPKP.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menguraikan gambaran umum organisasi berupa tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, dan sistematika laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Bab ini menguraikan pokok-pokok dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 berupa Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Bab ini menguraikan capaian kinerja tahun 2022, kinerja keuangan dan kinerja lainnya.

BAB IV Penutup.

Bab ini menyajikan ringkasan substansi laporan kinerja disertai dengan langkah-langkah perbaikan kinerja tahun 2022 terhadap sasaran kinerja yang belum tercapai.

LAMPIRAN

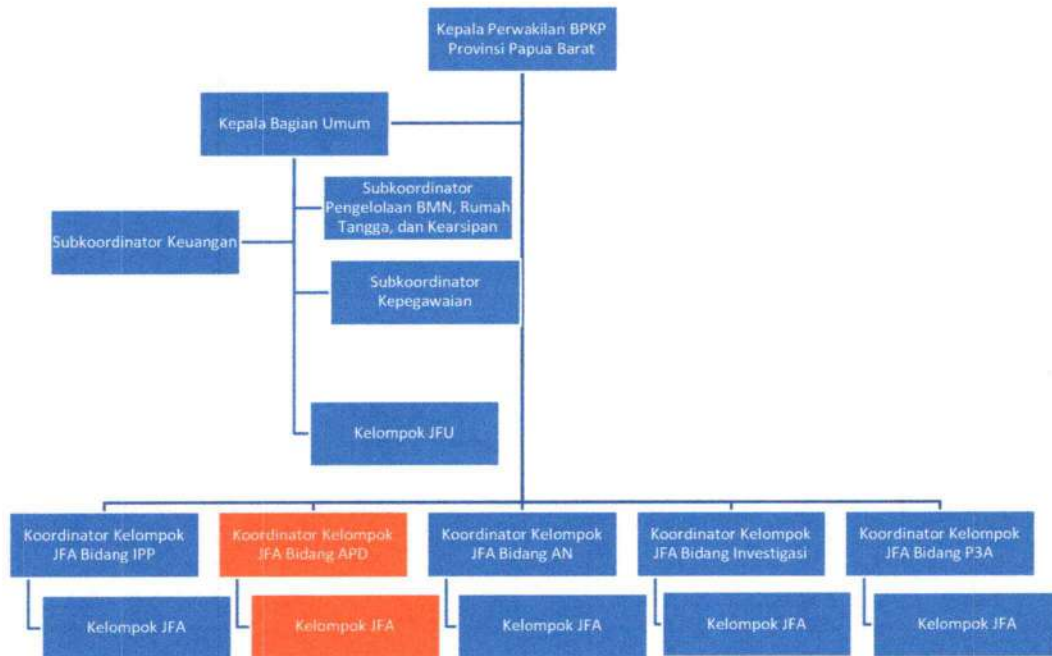
Bagian ini menyajikan dokumentasi kilas balik bidang APD Tahun 2022.

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Mengacu kepada tugas dan fungsi serta wewenang BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dengan memperhatikan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2020-2024, serta visi dan misi BPKP, Bidang APD memiliki fungsi sebagai instrumen yang memberikan produk jasa layanan kepada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dan atau layanan per Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), yang kemudian dituangkan dalam tugas antara lain sebagai berikut:

1. Asistensi Penyusunan SIMDA/FMIS (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda;
2. Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah (BMD);
3. Asistensi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES);
4. Asistensi Penyusunan SAKIP dan LAKIP Pemerintah Daerah;
5. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD);
6. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah;
7. Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Evaluasi atas SPI Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Bimbingan Teknis sebagai narasumber kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
10. Pembinaan SPIP Pemerintah Daerah;
11. Pendampingan *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) pada Pemerintah Daerah;
12. Pengawasan PSN Kawasan Ekonomi Khusus;
13. Monev dan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
14. Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa;
15. Pengawasan atas Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD);
16. Analisis Fiskal Pemda;
17. Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Bidang APD dipimpin oleh Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dijabat oleh Martinus Tonapa sejak Oktober 2021 sampai saat ini.

Jumlah pegawai Bidang APD per 31 Desember 2022 sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Supriyanto	Auditor Madya
2	Suharto	Auditor Madya
3	Andi Sukman	Auditor Muda
4	Loka Saputra	Auditor Muda
5	Arie Ryan Saputra	Auditor Pertama
6	Bindia Guswani Kusmin	Auditor Pertama
7	Achmad Nofrizal Ghufron	Auditor Pelaksana
8	M. Sobri Qomarudin	Auditor Pelaksana
9	M. Indra Arief Lubis	Auditor Pelaksana
10	Jonston Zosadak	Auditor Pelaksana

No	Nama	Jabatan
11	Bagus Qomuardli	Auditor Pelaksana
12	Rafa Nuha Nafisa	Auditor Pelaksana
13	Edo Agusta	Calon Auditor Pelaksana
14	Muhammad Nicho Alfariq	Calon Auditor Pelaksana
15	Ahmad Bukhari	Calon Auditor Pelaksana
16	Abdillah Hamdi A.Sy	Calon Auditor Pelaksana
17	Annas Hudy Norfatach Alhabsy	Calon Auditor Pelaksana
18	Reynaldi Ahmad Yusuf	Calon Auditor Pelaksana
19	Dodi Hadi Firdausi	Calon Auditor Pelaksana

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPKP yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 diformulasikan dalam visi BPKP, yaitu Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan misi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan penjabaran dari program strategis sesuai visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Visi dan misi serta tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020–2024. Program untuk menunjang kegiatan tersebut terdiri dari program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan program dukungan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan tahun 2020 – 2024 terdiri dari 6 sasaran kegiatan dengan 45 indikator kinerja yang terdiri dari 32 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dan 13 indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (*enabler*).

Dari 32 indikator kinerja kegiatan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2000 – 2024 yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada Bidang APD sebagai berikut :

	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah							
	1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/ Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	115	138	345	345	345
	2	Potensi Penerimaan Negara/ Daerah yang Dioptimalisasi	Rp (Juta)	230	230	576	576	576
	3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern pada K/L/P/BU							
	1	Jumlah K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Jumlah PEMD A	3	4	5	6	6
	2	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level	Jumlah PEMD A	0	1	2	3	4
	3	Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	%	0	0,18	0,37	0,55	1,11
	4	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi	1	1	1	1	1
	5	Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban	%	35	39,99	44,98	50,03	55,02

Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Keuangan Desa						
6 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Jumlah Desa	0	5	15	54	104

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menilai kegiatan pada tahun 2022, telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Korwas Bidang APD sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP dengan Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Perjanjian Kinerja tersebut menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran kegiatan dengan menetapkan target indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memuat 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 6 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	4.561
	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	335.807
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemkab/ Kota	2
	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemkab/ Kota	2
	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20
	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara Memadai	Desa	20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengumpulkan data kinerja yang merupakan capaian realisasi indikator kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, informasi yang mendukung/menghambat capaian kinerja, capaian realisasi dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan, upaya peningkatan kinerja ke depan.

Data kinerja yang diperoleh diharapkan menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, efisiensi, serta efektivitas.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	4.561	8.413	184,46%
	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	335.807	352.646	105,01%
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemkab/ Kota	2	1	50%
	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemkab/ Kota	2	1	50%
	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20	22	110%
	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara Memadai	Desa	20	22	110%

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Kegiatan 1 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Uraian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Kegiatan – Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi dihitung berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP. Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Realisasi nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp8.413.295.206,00 atau mencapai 184,46% dari target sebesar Rp4.561.000.000,00. Rincian nilai realisasi tersebut bersumber dari evaluasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022.

Perolehan nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi pada tahun 2022 dibandingkan nilai realisasi tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 31.060,35% dimana realisasi optimalisasi penerimaan negara/daerah tahun 2021 sebesar Rp27.000.000,00.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan APD sesuai PKPT APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dan Pemulihan Ekonomi, yaitu Pengawasan Akuntabilitas Pendapatan Daerah.

Guna mempertahankan kinerja di tahun 2023, Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan optimalisasi pada pemerintah daerah lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat guna menggali PAD yang masih bisa dapat dikembangkan.
- 2) Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis kepada pemerintah daerah yang dievaluasi guna meningkatkan PAD.

b. Indikator Kinerja Kegiatan – Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Indikator Kinerja nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menghitung jumlah nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat. Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah yang dimaksud yaitu nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang tidak tepat berdasarkan hasil kegiatan pengawasan BPKP.

Realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp352.646.217.985,89 atau mencapai 105,01% dari target sebesar Rp335.807.000.000,00.

Indikator Kinerja ini dilakukan oleh Bidang APD dan IPP sesuai PKPT yang mendukung sektor APP. Adapun sektor APP yang dilakukan oleh Bidang APD yaitu Pengawasan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Penugasan tersebut dilakukan dengan melakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah dari penugasan ini sebesar Rp340.322.060.874,00 atau 96,50% dari total Realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah pada tahun 2022.

2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

a. Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Capaian kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun 2022 adalah sebesar 50% atau terealisasi 1 Kabupaten/Kota dari target 2 Kabupaten/Kota. Pemda yang telah mencapai maturitas SPIP Level 3 tersebut adalah Kabupaten Sorong.

Indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah mencapai Maturitas SPIP \geq Level 3. Penetapan maturitas Level 3 dilaksanakan melalui tahapan evaluasi secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) untuk Pemerintah Kabupaten Sorong dan

Kabupaten Manokwari sedangkan 12 Pemda lainnya menggunakan metode Penilaian Cepat (PC).

Kabupaten Sorong telah memperoleh maturitas SPIP Level 3 berdasarkan penilaian/QA pada tahun 2017 dengan skor 3,000 (sesuai LSPIP-316/PW27/3/2017 tanggal 30 November 2017).

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dengan skor 3,788 (Level 3). Atas hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dengan skor 3,163 (Level 3). Selanjutnya atas hasil evaluasi tersebut, diajukan ekspos/evaluasi kepada Rendal yaitu Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Namun, hasil ekspos/evaluasi kepada Rendal ditemukan beberapa kelemahan sehingga terdapat koreksi atas hasil evaluasi perwakilan menjadi skor 2,769 (sesuai PE.09.03/LHP-513/PW27/3/2022 tanggal 30 Desember 2022). Sehingga Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Manokwari ditetapkan berada pada Level 2 (Berkembang). Penilaian ini menggunakan dasar penilaian sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) berupa Pengawasan atas Peningkatan Maturitas SPIP antara lain sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Manokwari Tahun 2022; dan
- 3) Validasi atas Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah.

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

- 1) Belum optimalnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan SPIP; dan
- 2) Masih sangat terbatasnya sarana prasarana termasuk dukungan penyediaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan SPIP.

Guna meningkatkan kinerja di tahun 2023, Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

- 1) Meningkatkan kerja sama dan mendorong komitmen pimpinan Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dalam peningkatan maturitas SPIP;
- 2) Berkoordinasi dengan APIP Daerah untuk mendorong dan membina penyelenggaraan SPIP pada OPD di wilayah Pemda APIP terkait; dan
- 3) Monitoring pelaksanaan *Area of Improvement* (Aoi) atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

b. Indikator Kinerja Kegiatan – Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Capaian kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 pada tahun 2022 adalah sebesar 50% atau terealisasi 1 Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 dari target sebanyak 2 Kabupaten/Kota. Pemda yang telah mencapai maturitas SPIP Level 3 tersebut adalah Kabupaten Sorong.

Indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang penyelenggaraan Manajemen Risiko (MR)nya berada pada Level 3 atau di atasnya.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan penilaian mandiri MRI bersamaan dengan SPIP Terintegrasi dengan skor 3,550 (Level 3). Atas hasil penilaian mandiri tersebut telah dilakukan evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dengan skor 3,061 (Level 3). Selanjutnya atas hasil evaluasi tersebut, diajukan ekspos/evaluasi kepada Rendal yaitu Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Namun, hasil ekspos/evaluasi kepada Rendal ditemukan beberapa kelemahan sehingga terdapat koreksi atas hasil evaluasi perwakilan menjadi skor 2,538 (sesuai PE.09.03/LHP-513/PW27/3/2022 tanggal 30 Desember 2022). Sehingga MRI pada Kabupaten Manokwari ditetapkan berada pada Level 2 (*Risk Aware*).

Penilaian Manajemen Risiko (MRI) pada 13 Pemerintah Daerah lainnya (selain Kabupaten Manokwari) di Provinsi Papua Barat menggunakan metode Penilaian Cepat. Selain itu, Kabupaten Sorong sebelumnya telah memperoleh MRI Level 3 berdasarkan penilaian/QA pada tahun 2017 (sesuai LSPIP-316/PW27/3/2017 tanggal 30 November 2017).

Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) antara lain sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
- 2) Monitoring Daftar Risiko.

Adapun Hambatan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

- 1) Belum optimalnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan Manajemen Risiko (MR);
- 2) Kurangnya SDM Pemda yang kompeten terkait MR; dan

- 3) Masih sangat terbatasnya sarana prasarana termasuk dukungan penyediaan teknologi informasi untuk peningkatan MRI.

Guna meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

- 1) Meningkatkan kerja sama dan mendorong komitmen pimpinan Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dalam penerapan Manajemen Risiko (MR);
- 2) Berkoordinasi dengan APIP Daerah untuk mendorong dan membina Manajemen Risiko (MR) pada OPD di wilayah Pemda APIP terkait; dan
- 3) Monitoring pelaksanaan *Area of Improvement* (Aoi) atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

c. Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel

Indikator jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel diukur dari jumlah desa di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Realisasi jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel pada tahun 2022 adalah sebanyak 22 desa atau mencapai 110% dari target sebanyak 20 desa. Desa-desanya tersebut terdiri dari 15 desa di Kabupaten Kaimana dan 7 desa di Kabupaten Bintuni dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa
Kaimana	Distrik Kaimana	1. Kampung Marsi 2. Kampung Namatota 3. Kampung Lobo 4. Kampung Trikora 5. Kampung Tanggaromi 6. Kampung Sisir 7. Kampung Foromajaya 8. Kampung Murano 9. Kampung Maimai 10. Kampung Lumira
	Distrik Baruway	11. Kampung Kambala 12. Kampung Yarona 13. Kampung Edor 14. Kampung Tairi 15. Kampung Gaka
Teluk Bintuni	Distrik Bintuni	16. Kampung Argosigemerai
	Distrik Manimeri	17. Kampung Banjar Ausoy 18. Kampung Waraitama
	Distrik Sumuri	19. Kampung Forada 20. Kampung Tanah Merah 21. Kampung Tofoi
	Distrik Tembuni	22. Kampung Bangun Mulya

Suatu desa dikatakan telah memiliki pengelolaan keuangan yang akuntabel apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Menggunakan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa seperti Peraturan Bupati Kaimana Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana;
- 2) Menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan;
- 3) Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada setiap tahapan;
- 4) Menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan APBDes;
- 5) Melakukan pengadministrasian dokumen/berkas/data keuangan.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh dari pelaksanaan beberapa PKPT APP yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) antara lain sebagai berikut:

Pengawasan atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa

- 1) Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa
- 2) Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa

Pengawasan atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

- 3) Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa,
- 4) Evaluasi Atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata Kelola Desa

- 5) Workshop evaluasi keuangan dan pembangunan desa

Pengawasan Program Pengembangan Potensi Desa

- 6) Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa.

Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
- 2) Meningkatkan kegiatan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa baik berupa kegiatan *assurance* maupun *consulting*;
- 3) Monitoring atas rekomendasi yang diberikan.

d. Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai

Indikator jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai diukur dari jumlah desa di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah melaksanakan pengelolaan aset desa secara memadai.

Realisasi jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai pada tahun 2022 adalah sebanyak 22 desa atau mencapai 110% dari target sebanyak 20 desa. Desa-desanya tersebut terdiri dari 15 desa di Kabupaten Kaimana dan 7 desa di Kabupaten Bintuni dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten	Kecamatan	Desa
Kaimana	Distrik Kaimana	1. Kampung Marsi 2. Kampung Namatota 3. Kampung Lobo 4. Kampung Trikora 5. Kampung Tanggaromi 6. Kampung Sisir 7. Kampung Foromajaya 8. Kampung Murano 9. Kampung Maimai 10. Kampung Lumira
	Distrik Baruway	11. Kampung Kambala 12. Kampung Yarona 13. Kampung Edor 14. Kampung Tairi 15. Kampung Gaka
Teluk Bintuni	Distrik Bintuni	16. Kampung Argosigemerai
	Distrik Manimeri	17. Kampung Banjar Ausoy 18. Kampung Waraitama
	Distrik Sumuri	19. Kampung Forada 20. Kampung Tanah Merah 21. Kampung Tofoi
	Distrik Tembuni	22. Kampung Bangun Mulya

Suatu desa dikatakan telah memiliki pengelolaan aset desa secara memadai apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Mengimplementasikan kebijakan yang berlaku seperti Peraturan Bupati Kaimana Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung di Kabupaten Kaimana,
- 2) Melakukan inventarisasi/pemeriksaan aset,
- 3) Membuat Buku/Daftar Aset desa,
- 4) Laporan inventarisasi/pemeriksaan aset, dan
- 5) Daftar aset disertai nilai masing-masing aset.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh dari pelaksanaan beberapa PKPT APP yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) antara lain sebagai berikut:

Pengawasan atas Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa

- 1) Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa,

Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata Kelola Desa

2) Workshop evaluasi keuangan dan pembangunan desa.

Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
- 2) Meningkatkan kegiatan pengawasan terkait pengelolaan aset desa baik berupa kegiatan *assurance* maupun *consulting*;
- 3) Monitoring atas rekomendasi yang diberikan.

B. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp2.139.494.000,00 atau 29,20% dari total anggaran Perwakilan sebesar Rp7.325.692.000,00.

Realisasi anggaran Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp2.136.331.219,00 atau terserap 99,85% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.139.494.000,00.

C. Capaian Kinerja lainnya (PKPT)

Selama tahun 2022, Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah melaksanakan 37 PKPT dan telah menerbitkan 183 Surat Tugas.

Per 31 Desember 2022 telah diterbitkan laporannya sebanyak 183 laporan atau 100% dari surat Tugas yang terbit.

Rincian *output* dari dari 37 (tiga puluh tujuh) PKPT tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Implementasi Bantuan Sosial Bersumber dana APBD.
2. Pengawasan Penggunaan Dana Transfer pada Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Evaluasi atas Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
4. Evaluasi atas Penyaluran BLT-DD.
5. Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa.
6. Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa.
8. Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa.
9. Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda A.
10. Pengawasan Aset strategis Pemda.

11. Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ Tw I, Tw II, Tw III, dan Tw IV.
12. Bimtek Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemda A.
13. Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda A.
14. Konsultasi Implementasi SIMDA-NG (FMIS)/CACM Pemda A.
15. Evaluasi atas Tata Kelola Cadangan Pangan pada Pemerintah Daerah.
16. Evaluasi atas Program Pengembangan Industri Perikanan Provinsi Papua Barat.
17. Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19 pada Pemda.
18. Evaluasi Implementasi Perizinan Berusaha (OSS) di Daerah.
19. Pengawasan atas Peningkatan Maturitas SPIP.
20. Verifikasi Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah.
21. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah pada pemda.
22. Pengawasan Penggunaan Dana Transfer dan Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN.
23. Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah.
24. *Coaching Clinic* Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari TA 2021.
25. *Coaching Clinic* dalam rangka Persiapan Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan Aset BMD Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
26. *Coaching Clinic* Rekonsiliasi Kas Daerah pada Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021.
27. Rekonsiliasi Data BMD dan Konsolidasi terhadap LKPD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021.
28. *Coaching Clinic* dalam rangka Persiapan Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Maybrat.
29. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Sorong Tahun Anggaran 2020.
30. Evaluasi atas Program Pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Provinsi Papua Barat.
31. Pengawasan P3DN Daerah.
32. *Workshop* evaluasi keuangan dan pembangunan desa.
33. Pengawasan atas Stunting.
34. Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Primer.
35. Pengawasan Optimalisasi Program Padat Karya (PKTD).
36. Pengawasan atas PSN KEK Sorong.



37. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tujuan yang dimandatkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Perjanjian kinerja Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Tahun 2022 mengamanahkan 6 (enam) Indikator Kinerja pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan.

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Sebanyak 4 (empat) Indikator Kegiatan yang menjadi target Bidang APD pada tahun 2022 telah mencapai kinerja $\geq 100\%$ dan 2 (dua) Indikator Kegiatan yang mencapai kinerja $< 100\%$ yaitu SPIP dan MRI Level 3 pada Pemerintah Daerah yang masing-masing hanya mencapai 50% dari target yang telah ditetapkan. Namun secara keseluruhan, rata-rata target kinerja Bidang APD pada tahun 2022 telah mencapai 101,58%.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mencakup 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat khususnya dalam mendorong akuntabilitas keuangan, pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Berbagai upaya untuk menunjang pencapaian kinerja pada tahun 2023 antara lain dapat dilakukan dengan:

1. Melakukan pendampingan akuntabilitas pemerintah daerah khususnya pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru terbentuk baik dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Daerah.
3. Melakukan pembinaan dalam penerapan Manajemen Risiko (MR) pada Pemerintah Daerah.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tata kelola keuangan daerah dan desa serta program lintas sektoral pemerintah.

5. Mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah dan Desa melalui penggunaan sistem informasi FMIS dan Siskeudes.
6. Meningkatkan kompetensi SDM Bidang APD untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas.

Kilas Balik Bidang APD Tahun 2022

1. Kegiatan Workshop Dana Desa Kabupaten Sorong

Workshop Evaluasi Akuntabilitas
Keuangan dan Pembangunan Desa
Kabupaten Sorong Tahun 2022





Pembukaan acara oleh Pj Bupati Sorong yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, Suroso S IP, M.A.



Narasumber Analisis Kebijakan Publik Badan Pengembangan dan Informasi – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Noviati Ariani



Narasumber Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, Bayu Andi Prasetya, S.E., M.Si.,



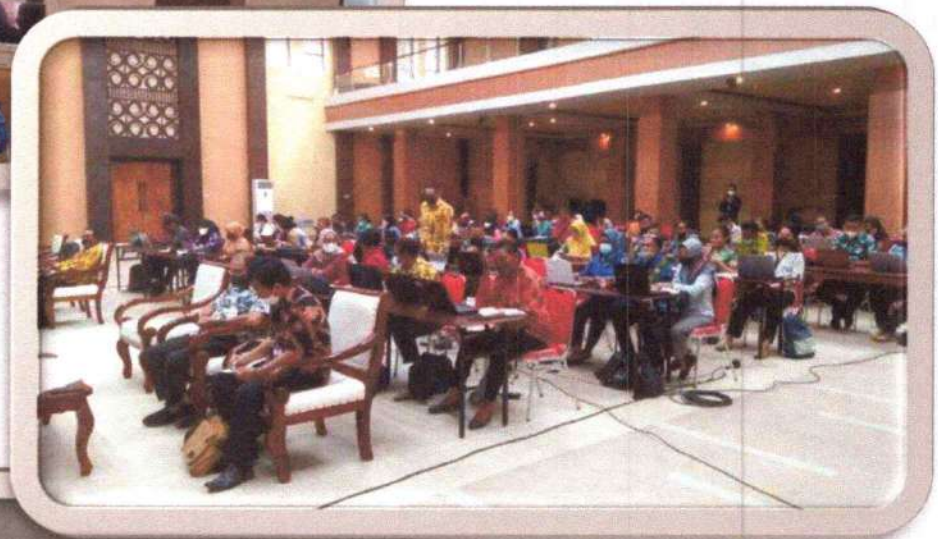
Narasumber Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Wasis Prabowo, dengan tema "Kolaborasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Pembangunan, dan Aset Desa Dalam Mengatasi Tingkat Kemiskinan, serta Meningkatkan Kemandirian Desa"



Penyerahan Plakat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Kepada Para Narasumber

2. Kegiatan FMIS pada Perwakilan BPKP Papua Barat

Bimtek Penatausahaan FMIS pada
Pemerintah Kota Sorong



3. Kegiatan Panel SPIP Terintegrasi Kab Manokwari



Ekspose Panel Perwakilan SPIP Terintegrasi Kabupaten Manokwari Tahun 2022



4. Kegiatan Pengawasan Lintas Sektor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 8 PRAFI
Jln. Arahok Kampung Prafi Maha Distrik Prafi 98216
Email : smpn13prafi@gmail.com



Evaluasi Dana Transfer Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah Kab Manokwari

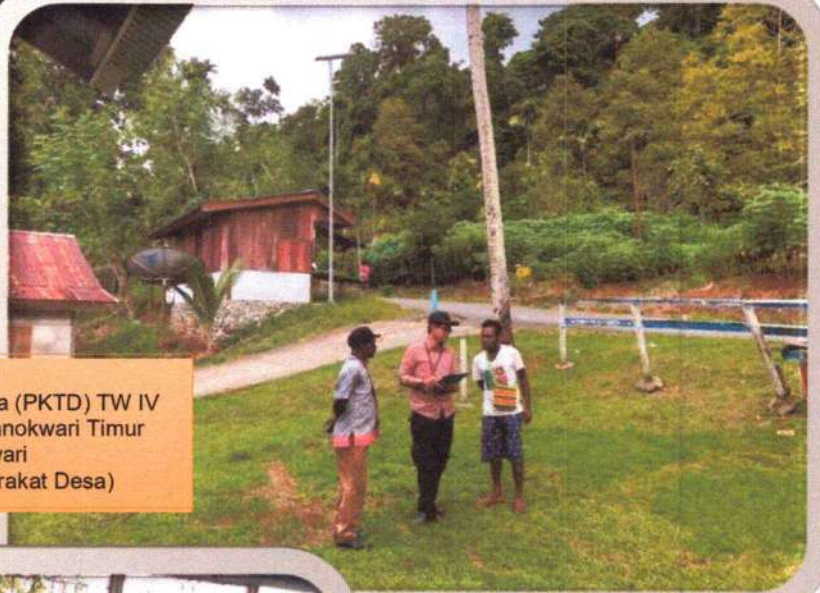


Monitoring Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong, pembangunan jaringan pipa air bersih TW IV

5. Kegiatan Wasintern Desa Papua Barat



Wasintern Desa
Evaluasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) TW IV
pada Kampung Mansiman Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari
(Wawancara dengan masyarakat Desa)

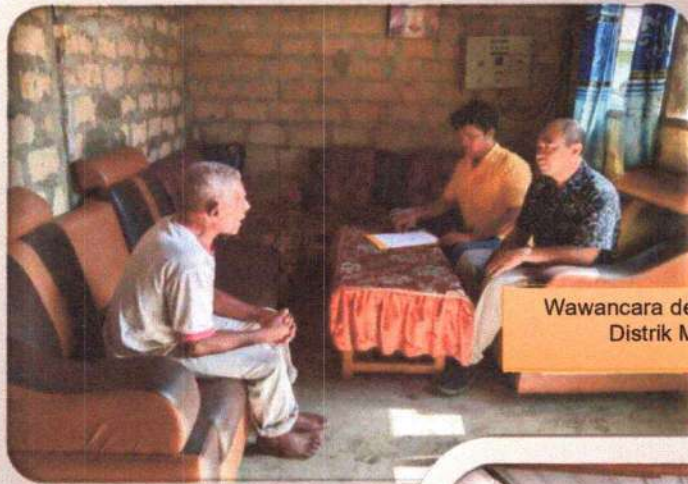


Wasintern Desa
Evaluasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) TW IV
pada Kampung Aipiri Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari
(Wawancara dengan masyarakat Desa)



Wasintern Desa
Evaluasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD) TW IV
pada Kampung Susweni Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari
(Wawancara dengan masyarakat Desa)

Evaluasi BLT DD TW II pada Kampung
Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong



Wawancara dengan Kepala Kampung Baintete
Distrik Makbon Kabupaten Sorong

Wasintern Desa
Evaluasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat TW IV
pada Puskesmas Distrik Prafi Kabupaten Manokwari
(Wawancara dengan petugas Puskesmas Prafi)

